

# AUSTRALIA DAN KAWASAN PASIFIK SELATAN

Ronald NANGOI\*

## PENDAHULUAN

Kedudukan Australia di bagian selatan kawasan Pasifik cukup menarik, karena Australia memiliki beberapa karakteristik yang khas seperti karakteristik teritorial dan kemasyarakatan. Secara geografis, Australia terletak di antara tiga kawasan penting, yaitu Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik termasuk Pasifik Selatan, sehingga negara ini mempunyai potensi untuk memainkan peranan regional yang luas. Apalagi Australia termasuk negara kaya di antara negara-negara kawasan-kawasan itu. Di kawasan Pasifik Selatan khususnya kedudukan Australia cukup unik, karena meskipun secara geografis terletak di kawasan ini, penduduk dan kebudayaannya berbeda dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Penduduk Australia umumnya merupakan keturunan Eropa dengan kebudayaan Barat, sedangkan penduduk pulau-pulau Pasifik Selatan berkebangsaan dan berkebudayaan asli, yaitu Polinesia dan Melanesia.

Selain itu, Australia merupakan kekuatan yang berpengaruh di Pasifik Selatan, karena kemampuannya (wilayah, manusia, ekonomi, dan militer) melebihi kemampuan negara-negara kawasan. Penduduk Australia (14,5 juta) lebih dari separuh jumlah penduduk Pasifik (sekitar 25 juta). Australia memiliki daratan yang luas sekali, yaitu 7,7 juta km<sup>2</sup>, jauh lebih luas daripada seluruh negara Pasifik Selatan (sekitar 821.000 km<sup>2</sup>). Dari segi ekonomi, Australia memiliki GNP yang tinggi di kawasan Pasifik Selatan (lihat Tabel 1). Di bidang militer, Australia memiliki angkatan bersenjata terbesar (71.011) di kawasan dan satu-satunya negara Pasifik Selatan yang mempunyai kemampuan produksi militer yang besar.

Tabel 1

**LUAS WILAYAH, PENDUDUK, DAN GNP PER KAPITA NEGARA-NEGARA  
PASIFIK SELATAN**

Negara	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk (tahun perkiraan)	GNP Per Kapita (US\$)
Kepulauan Cook	234	19.250 (1979)	...
Fiji	18.274	625.000 (1980)	1.160 (1978)
Polinesia Perancis	4.000	137.000 (1977)	5.270 (1978)
Guam	549	105.000 (1978)	7.130 (1978)
Kiribati	719	57.300 (1978)	...
Nauru	22	7.700 (1979)	...
Kaledonia Baru	22.125	137.000 (1979)	4.650 (1978)
Niue	258	3.575 (1979)	...
Kepulauan Norfolk	34,5	1.695 (1978)	...
Kepulauan Pitcairn	450	64 (1979)	...
Kepulauan Solomon	28.446	221.500 (1980)	430 (1978)
Tokelau	...	1.565 (1978)	...
Tonga	700	95.000 (1980)	...
Tuvalu	26	7.300 (1979)	...
Vanuatu	11.880	112.600 (1979)	540 (1978)
Wallis & Futuna	274	10.000 (1979)	...
Samoa Amerika	196	32.500 (1980)	7.400 (1978)
Samoa Barat	2.840	155.500 (1980)	450 (1978)
Papua Nugini	461.691	3.000.000 (1980)	600 (1979)
Selandia Baru	268.676	3.100.000 (1980)	5.930 (1979)
Australia	7.686.848	14.480.000 (1980)	9.120 (1979)

Sumber: Diolah dari *Asia & Pacific 1982* (Essex: World of Information).

Tabel 2

**PERSONAL ANGKATAN BERSENJATA 1980-1981**

Negara	Angkatan Darat	Angkatan Laut	Angkatan Udara	Jumlah
Australia	32.010	16.930	22.071	71.011
Selandia Baru	5.666	2.755	4.219	12.640
Papua Nugini	3.200	410	82	3.692
Fiji	1.300	120	—	1.420

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Australia merupakan kekuatan potensial utama dan negara yang berpengaruh di Pasifik Selatan; dan ketergantungan negara-negara kecil Pasifik Selatan yang besar pada Australia semakin memperbesar pengaruh itu. Tetapi sumbangan Australia untuk kawasan ini kurang memuaskan negara-negara Pasifik Selatan seperti terungkap dalam kecaman-kecaman mereka terhadap Australia.

### PERANAN REGIONAL AUSTRALIA DI PASIFIK SELATAN

Pada tingkat tertentu, keterlibatan Australia di kawasan Pasifik Selatan cukup jelas dan positif. Negara ini menunjukkan sikap toleran dan tanggung jawab regional di kawasan ini. Australia mendukung usaha-usaha/aspirasi negara-negara Pasifik Selatan antara lain dengan merintis terbentuknya Komisi Pasifik Selatan (dan Forum Pasifik Selatan) dan menjadi donor terbesar dalam komisi itu.<sup>1</sup> Mengenai dekolonisasi di Pasifik Selatan, Australia bersama negara-negara baru mendesak kekuatan kolonial Perancis untuk memberikan kemerdekaan kepada Kaledonia Baru. Selain itu ia mengecam percobaan-percobaan nuklir Perancis di Mururoa. Sebagai negara paling kaya di kawasan itu ia memberikan juga bantuan dana kepada negara-negara ini, khususnya Papua Nugini, bagi pembangunan sosial dan ekonomi mereka. June Verrier mengatakan bahwa Australia adalah negara pensuplai terbesar bagi negara-negara pulau (kecuali Samoa Barat) dan menjual lebih banyak kepada kawasan itu daripada gabungan penjualan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Selandia Baru.<sup>2</sup> Selain itu, Australia memberikan bantuan sebesar \$ 60 juta kepada Pasifik Selatan (di luar Papua Nugini) untuk masa triennium 1977-1979.<sup>3</sup>

Tetapi mengenai kepentingan regional, Australia tidak membatasi perhatiannya pada kawasan Pasifik Selatan *per se*. Pernyataan-pernyataan para pemimpin Australia cenderung menekankan perhatian untuk beberapa kawasan lain, yaitu Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Letak geografis Australia di antara kawasan-kawasan ini melatarbelakangi sikapnya. Pada tahun 1970 Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser mengatakan: "Kawasan Asia Tenggara dan perairan Samudra Hindia dan Pasifik menjadi lingkungan kami: kami juga menjadi bagian lingkungan seperti negara-negara lain di kawasan kami. Apabila lingkungan ini mengalami perubahan, kami ingin me-

<sup>1</sup>Lihat June Verrier, "Priorities in Papua New Guinea's Evolving Foreign Policy: Some Legacies and Lessons of History," *Australian Outlook*, Vol. 28, No. 3, Desember 1974, hal. 298.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 299.

<sup>3</sup>Lihat R.A. Herr, "Jimmy Carter and American Foreign Policy in the Pacific Islands," *Australian Outlook*, Vol. 22, No. 2, Agustus 1970, hal. 233.

mainkan peranan yang berarti dalam perubahan itu."<sup>1</sup> Perhatian untuk kawasan-kawasan tersebut secara eksplisit terdapat dalam kebijakan luar negeri Australia. Misalnya, salah satu kebijakan luar negeri Australia yang diajukan pada tahun 1968 menyebutkan bahwa "Australia mempunyai kepentingan langsung dan khusus di Asia bagian selatan dan timur, Pasifik Barat dan Samudra Hindia."<sup>2</sup>

Di kawasan Pasifik Selatan, perhatian Australia lebih tertuju pada Papua Nugini. Keterikatan khusus Australia dengan Papua Nugini itu terlihat jelas dalam kepentingan internasional Australia, meskipun Australia mempunyai kepentingan dengan kawasan terdekat. Gough Whitlam sewaktu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia mengajukan lima sokoguru untuk meningkatkan hubungan internasional, yaitu: (1) keterikatan yang mendasar pada keamanan nasional kami; (2) keterikatan pada Papua Nugini yang bersahabat, bersatu dan aman; (3) keterikatan untuk berhubungan secara bersahabat dengan Indonesia; (4) keterikatan pada perdamaian dan kesejahteraan kawasan terdekat; dan (5) keterikatan pada nama baik Australia.<sup>3</sup> Jelas dari sokoguru-sokoguru ini bahwa Australia tidak menyebutkan kawasan Pasifik Selatan secara eksplisit.

## PAPUA NUGINI PUSAT PERHATIAN AUSTRALIA

Hubungan antara Australia dan Papua Nugini banyak ditentukan oleh faktor sejarah dan geografis. Semula Papua Nugini merupakan jajahan Australia utama di Pasifik Selatan untuk jangka waktu yang cukup lama. Setelah kemerdekaan Papua Nugini, Australia memperlakukannya sebagai tetangga dan sahabat terdekat di Pasifik Selatan.

Australia merasa bahwa Papua Nugini mempengaruhi keamanannya, karena letak geografis yang begitu dekat dengannya. Terdapat anggapan bahwa apabila wilayah Papua Nugini terancam, maka keamanan Australia juga akan terancam. Dalam hal ini, Australia pernah mencurigai Indonesia sebagai sumber ancaman yang potensial. Pada waktu yang lalu terdapat kekuatiran bahwa setelah merdeka Papua Nugini akan menghadapi masalah perbatasan dengan Indonesia. Beberapa tulisan mengungkapkan kecemasan dan kecu-

<sup>1</sup>Lihat W. David McIntyre, "The Interests of the Middle Powers," dalam Mary Boyd, Ed., *Pacific Horizons* (Wellington: Price Milburn and Company Limited, 1972), hal. 80.

<sup>2</sup>McIntyre mengutip *Current Notes on International Affairs*, Canberra 1967, Vol. 38, No. 2; *ibid.*, hal. 79.

<sup>3</sup>Lihat W.P. Hogan, "Australian Economic Policy Opportunities in Asia and the Pacific," *Australian Quarterly*, Vol. 22, No. 1, 1956, hal. 10.

rigaan Australia akan ancaman Indonesia itu. Antara lain, Ralph Premdas mengemukakan bahwa, di antara berbagai ancaman, *Indonesia bisa dilihat sebagai ancaman di masa mendatang*.<sup>1</sup> Joint Committee on Foreign Affairs and Defence dalam buku *Threats to Australia's Security* melaporkan bahwa "dari waktu ke waktu terdapat spekulasi bahwa perang bisa berkembang antara Indonesia dan Australia karena Australia akan merasa wajib untuk membantu Papua Nugini apabila ia menjadi sasaran agresi Indonesia."<sup>2</sup>

Kecemasan dengan ancaman luar terhadap Papua Nugini itu sebenarnya mencerminkan kepanikan Australia dalam menghadapi situasi regional. Indonesia tidak pernah menunjukkan keinginan atau kecenderungan untuk mengganggu wilayah Papua Nugini, dan hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini bahkan mengalami banyak perkembangan. Hugh Smith menyebutkan sejumlah alasan perhatian Australia untuk ancaman luar terhadap Papua Nugini. *Pertama*, Australia sebagai anggota masyarakat internasional yang baik wajar memperhatikan kegiatan-kegiatan anti sosial seperti ancaman terhadap negara-negara berdaulat atau agresi nyata (baik serangan langsung maupun subversi pemerintah secara tidak langsung). Piagam PBB, di antara sarana internasional lainnya, secara ketat membatasi penggunaan kekuatan oleh semua negara. *Kedua*, secara lebih terperinci, Australia cenderung kuatir dengan ancaman yang berasal dari *tetangga* Papua Nugini, karena negara itu juga merupakan tetangga dekat Australia. *Ketiga*, Papua Nugini mungkin mempunyai kepentingan strategi dalam seluruh pertahanan Australia. Kepentingan ini umumnya telah diperkecil dalam tahun-tahun terakhir karena terdapat perkiraan umum (dan mungkin benar) bahwa tidak akan ada ancaman yang berarti terhadap Papua Nugini. *Keempat*, Australia mempunyai kewajiban khusus untuk melindungi Papua Nugini, walaupun tidak ada petunjuk perlunya mengadakan perjanjian pertahanan. Tetapi kewajiban politik terhadap Papua Nugini dan keinginan untuk mempertahankan *realibilitasnya* (istilah Amerika adalah *kredibilitas*) sebagai sahabat atau sekutu negara-negara yang menghadapi ancaman-ancaman internasional bisa terbukti sama efektif seperti paragraf dalam suatu perjanjian resmi.<sup>3</sup>

Australia begitu memperhatikan Papua Nugini, sehingga tidak pernah mempersoalkan kemerdekaannya. Dalam pernyataan-pernyataan resmi, Papua Nugini tetap dianggap sebagai sahabat dekatnya. Andrew Peacock

<sup>1</sup>Lihat Ralph Premdas, "Toward a Papua New Guinea Foreign Policy: Constraints and Choice," *Australian Outlook*, Vol. 30, No. 2, Agustus 1976, hal. 272.

<sup>2</sup>Lihat Joint Committee on Foreign Affairs and Defence, *Threats to Australia's Security* (Canberra: Australian Government Publishing Service, 1981), hal. 37.

<sup>3</sup>Lihat Hugh Smith, "Internal Conflict in an Independent PNG: Problems of Australian In-

pada waktu menjabat sebagai Menteri Urusan Wilayah mengatakan: "Kemerdekaan tidak akan mengubah beberapa faktor utama yang mempengaruhi hubungan kami di masa mendatang, faktor geografis adalah satu di antaranya. Papua Nugini adalah tetangga kami yang paling dekat. Adalah wajar bagi kedua negara kita untuk bersahabat satu sama lain, karena tindakan satu negara terikat pada hal-hal penting untuk mempengaruhi yang lain."<sup>1</sup> Oleh sebab itu Papua Nugini mendapat perhatian yang sama sebelum maupun sesudah merdeka.

Semasa penjajahan, Australia jelas mempunyai akses yang besar ke perekonomian Papua Nugini. Misalnya, penelitian Brookfield memperkirakan bahwa sekitar 68% sektor moneter Papua Nugini dikuasai perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak asing. Australia sendiri menguasai 60% pendapatan sektor moneter itu. Di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, selama tahun 1971-1972 perusahaan-perusahaan Australia menyumbang sekitar \$ 24 juta atau sekitar 33⅓% dari seluruh nilai pengeluaran. Australia juga mempunyai pengaruh kuat atas hasil-hasil pertanian utama Papua Nugini (coklat, kopi, kopra, karet, dan teh). Pemilikan Australia atas industri coklat diperkirakan 55-60%, dan dalam industri kopi 20-25%. Mengenai industri kopra, Australia menguasai sekitar 80% produksi seluruh perdagangan.<sup>2</sup> Pembahasan penguasaan Australia ini belum mencakup unsur-unsur perekonomian lainnya, seperti distribusi perdagangan, pariwisata, dan penanaman modal asing. Mengenai bantuan luar negeri, Australia memprioritaskan Papua Nugini dengan memberikan hampir ⅓ jumlah seluruh bantuan yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang.<sup>3</sup>

Setelah Papua Nugini merdeka, Australia terikat janji untuk membantu pembangunan nasionalnya. Selama periode 1976-1981, Pemerintah Australia memberikan bantuan sebesar \$ 930 juta dan juga bantuan bagi pembangunan pelabuhan udara di Port Moresby dan bagi rencana-rencana latihan dan pendidikan.<sup>4</sup> Untuk periode lima tahun berikutnya (1981-1986), Pemerintah Australia telah memutuskan untuk memberikan bantuan sebesar \$ 1.326 juta kepada Papua Nugini.<sup>5</sup> Bantuan ini kiranya sejalan dengan sikap Australia untuk memprioritaskan Papua Nugini. Pada waktu pengangkatan Julius

<sup>1</sup>Lihat June Verrier, *loc. cit.*, hal. 291.

<sup>2</sup>Lihat Ralph Premdas, *loc. cit.*, hal. 266; ia mengutip J. Camilleri, "Australian Involvement in Papua New Guinea," *ACFOA Research and Information Service Bulletin*, April 1974, hal. 1 dan juga Fred Brenckley, "The Stranglehold Australia has - and will keep - on PNG," *The National Times*, 19-24 Nopember, 1973, hal. 8.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 267-268.

<sup>4</sup>Lihat *The Far East and Australasia 1980-1981* (London: Europe Publications Limited, 1980), hal. 178.

Chan menjadi Perdana Menteri Papua Nugini tahun 1980, Andrew Peacock yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Australia menyatakan bahwa *Pemerintah Australia akan terus memberikan prioritas tinggi kepada pemeliharaan dan pengembangan hubungan yang erat yang telah dibina antara kedua negara itu selama bertahun-tahun.*<sup>1</sup> Sebaliknya, Papua Nugini menyadari ketergantungannya pada Australia sebagaimana terungkap dalam pernyataan Ebia Olewale bahwa "mereka masih menggantungkan diri pada Australia untuk bantuan ekonomi, untuk pemberian tenaga-tenaga ahli dan penasihat-penasihat, dan untuk bantuan berupa pembangunan ekonomi dan pertahanan."<sup>2</sup>

Tetapi Papua Nugini tampaknya tidak puas dengan Australia terutama mengenai bidang perdagangan bilateral, karena merasa dirugikan Australia akibat defisit perdagangannya. Misalnya pada tahun 1978/1979, ekspor Australia ke Papua Nugini bernilai \$ 293,7 juta, yang jauh lebih besar dari nilai impor dari Papua Nugini yang hanya berjumlah \$ 69,6 juta. Papua Nugini menginginkan agar Australia meningkatkan pembelian hasil-hasil produksinya. Ketidakseimbangan perdagangan bilateral ini menyebabkan Papua Nugini meragukan bantuan Australia. Negara ini mulai menganggap bahwa bantuan Canberra sebagai bentuk neo-kolonialisme.<sup>3</sup>

## HUBUNGAN KURANG ERAT AUSTRALIA DENGAN NEGARA-NEGARA PULAU

Perbedaan perhatian Australia untuk negara-negara pulau Pasifik Selatan cukup menyolok seperti terlihat dalam program bantuan luar negeri Australia di Pasifik Selatan. Bantuan luar negeri ini penting karena di satu pihak bisa menjadi sarana utama Australia untuk mendekatkan diri dengan negara-negara Dunia Ketiga termasuk Pasifik Selatan; dan di pihak lain dibutuhkan negara-negara baru Pasifik Selatan untuk pembangunan mereka. Perbedaan itu menunjukkan bahwa Australia cenderung mengistimewakan Papua Nugini di atas negara-negara kawasan lainnya. Dalam tahun 1977 misalnya, Australia memberikan bantuan kepada Papua Nugini sebesar \$ 250,2 juta sekitar 90% jumlah bantuannya untuk kawasan Pasifik Selatan (\$ 270,8 juta).

Perlakuan Australia dalam bantuan luar negeri ini bisa dimengerti, karena sejak akhir 1960 terdapat semacam pembagian tugas di kawasan Pasifik

<sup>1</sup>Lihat *Sinar Harapan*, 13 Maret 1981.

<sup>2</sup>Lihat Ebia Olewale M.H.A., "The PNG Must Have a Truly Independent Foreign Policy," dalam James Griffin, Ed., *A Foreign Policy for an Independent Papua New Guinea* (Sydney: Angus and Robertson Pty. Ltd., 1974), hal. 69.

<sup>3</sup>Lihat Juerg Meister, "The Southern Hemisphere as a Defence Community," *Pacific Defence*

Tabel 3

**BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN  
1977**

Negara	Bantuan (ribuan \$)
Kepulauan Cook	341
Fiji	7.067
Guam Kiripiti	1.686
Nauru	1
New Hebrides (Vanuatu)	928
Niue	1
Kepulauan Norfolk	144
Papua Nugini	250.162
Kepulauan Solomon	1.949
Tonga	2.397
US Trust Territory	26
Tuvalu	409
Samoa Barat	4.333
Kawasan yang tidak teralokasi	1.530
<b>Jumlah</b>	<b>270.832</b>

*Sumber:* South Pacific Commission 1979 yang dikutip R. Debreceny, "New Zealand and the South Pacific," (Dunedin: University of Otago, 1981), hal. 95.

Selatan antara Australia dan Selandia Baru. Australia umumnya menyetujui bahwa Selandia Baru akan memainkan peranan utama di kawasan Pasifik Selatan terutama di negara-negara Polinesia, sedangkan Papua Nugini menjadi bagiannya.<sup>1</sup> Pembagian tugas ini jelas didasarkan atas pertimbangan geografis. Australia lebih mengutamakan Papua Nugini (dan juga kawasan Asia Tenggara) karena berhadapan langsung dengan Papua Nugini (dan Indonesia), sedangkan Selandia Baru merasa wajib melibatkan diri dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya karena berbatasan langsung dengan mereka. Alur komunikasi Selandia Baru dengan Eropa dan Amerika di bagian timur melintasi Pasifik, sehingga Selandia Baru mempunyai hubungan lebih kuat dengan wilayah pulau-pulau Pasifik sebelah timur Papua Nugini.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Lihat R.A. Herr, "The New South Pacific: Foreign Policy in A Changing Region," dalam T.J. Hearn, Eoi., *New Zealand and the South Pacific* (Dunedin: University of Otago, 1981), hal. 31; dan lihat juga Max Karundeng, "Prioritas Utama: Keamanan Negara-negara Kepulauan di Pasifik Selatan," *Sinar Harapan*, 12 April 1982.

<sup>2</sup>Lihat Hedley Bull, "Australia-New Zealand Defence Cooperation," *Defence Perspectives*

Dengan sikap seperti ini Australia secara tidak langsung telah menciptakan jarak dengan negara-negara Pasifik Selatan. Apalagi di antara kedua pihak terdapat perbedaan yang cukup mendasar, yaitu bahwa di satu pihak Australia berstatus negara kaya, sedangkan di pihak lain negara-negara Pasifik Selatan miskin dan membutuhkan bantuan negara maju seperti Australia.

Sebagai tambahan, negara-negara Pasifik Selatan tidak menginginkan bahwa Australia (dan Selandia Baru) menjadi bagian integral kawasan atau komunitas mereka, tetapi hanya sebagai *donor*.<sup>1</sup> Apalagi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Australia dan negara-negara pulau ini mempunyai latar belakang kemasyarakatan dan kebudayaan yang amat berlainan, yang Barat dan yang lain Melanesia/Polinesia. Dalam suatu konperensi yang diselenggarakan oleh *Centre for Continuing Education, Australian National University* dan *Foundation for the Peoples of the South Pacific* yang berkedudukan di New York, Perdana Menteri Vanuatu, Walter Lini mengemukakan bahwa kesadaran akan prinsip-prinsip Melanesia tumbuh kembali di kalangan masyarakat pulau Pasifik. Ia menunjukkan perbedaan antara konsep Barat dan Melanesia. Misalnya, konsep Barat mengenai tanah sebagai komoditi yang bisa dipasarkan dianggap *immoral* dalam kebudayaan Melanesia. Oleh sebab itu, ia mengingatkan bahwa hubungan Australia dengan negara-negara pulau Pasifik pada dasarnya bergantung pada sikap Australia untuk mengakui kenyataan bahwa negara-negara Pasifik Selatan sedang memperjuangkan bangkitnya kembali tata nilai, prinsip, dan harapan Melanesia.<sup>2</sup>

Perbedaan dalam hal-hal seperti ini merupakan salah satu faktor hubungan yang kurat erat antara mereka. Rasa tidak puas negara-negara Pasifik Selatan juga disebabkan oleh pengalaman kerja sama mereka dengan Australia di bidang perdagangan yang tidak seimbang, dalam arti bahwa mereka mengalami defisit. Australia tidak begitu berminat untuk mengimpor hasil-hasil produksi pulau-pulau tersebut.<sup>3</sup> Perjanjian perdagangan yang dikenal sebagai *South Pacific Regional Trade and Economic Agreement (SPARTECA)*<sup>4</sup> dirasakan tidak banyak membantu negara-negara pulau itu. Dalam konperensi tersebut di atas, anggapan Australia bahwa SPARTECA merupakan langkah positif untuk membantu perekonomian pulau mengatasi jurang (*gap*) perdagangan yang tidak berimbang melalui peningkatan ekspor industri mereka mendapat kecaman. William Sutherland dari *Universitas Pasifik Selatan*

<sup>1</sup>Lihat June Verrier, *loc. cit.*, hal. 299.

<sup>2</sup>Lihat Hellen Hill, "Stirrings of Solidarity," *Far Eastern Economic Review*, 19 Maret 1982.

<sup>3</sup>Lihat Keith Jackson, "A South Pacific Council," dalam Mary Boyd, Ed., *loc. cit.*, hal. 42.

<sup>4</sup>Perjanjian ini menetapkan bahwa Australia dan Selandia Baru memberi akses bebas pajak (*duty free*) bagi barang-barang buatan pabrik dan hasil-hasil produksi primer dari negara-negara

menunjukkan bahwa ketidakseimbangan perdagangan menguntungkan pihak Australia: Australia menempati kedudukan teratas sebagai sumber impor kawasan Pasifik, tetapi kedudukan keempat sesudah Jepang, Amerika Serikat, dan Perancis sebagai pasaran ekspor. Pada hematnya SPARTECA tidak begitu berarti, paling tidak merupakan topeng (facade) yang dibaliknya tetap terdapat hubungan ketergantungan.<sup>1</sup>

## PENUTUP

Uraian di atas menunjukkan bahwa, meskipun Australia telah memberikan sumbangan berupa bantuan luar negeri dan dukungan politik bagi perkembangan dan pembangunan di kawasan Pasifik Selatan, negara-negara kecil di kawasan itu merasa tidak puas terhadapnya, karena menganggapnya tidak adil, terutama di bidang perdagangan bilateral. Akibatnya, hubungan mereka menjadi kurang erat. Apalagi Australia tampaknya lebih memusatkan perhatiannya pada beberapa kawasan dunia lain, yaitu Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Dan walaupun Australia memperhatikan kawasan Pasifik Selatan, ia lebih memprioritaskan Papua Nugini seperti terlihat dalam perbedaan intensitas bantuan luar negeri kepada negara-negara Pasifik Selatan.

Tetapi hubungan mereka kiranya tidak akan memburuk, karena adanya ketergantungan di dalamnya. Negara-negara Pasifik Selatan tetap membutuhkan bantuan dari Australia sebagai negara paling maju di Pasifik Selatan. Sebaliknya, Australia merasa perlu melibatkan diri di kawasan itu. Dengan kemampuannya, setidaknya-tidaknya ia bisa memainkan peranan besar untuk menggantikan Inggeris dan Perancis, yang mulai meninggalkan kawasan itu dalam proses dekolonisasi. Apalagi Uni Soviet mulai mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap negara-negara Pasifik Selatan antara lain dengan menawarkan jasa untuk mengembangkan perikanan, oceanografi, dan hidrografi dan menunjukkan perhatian untuk proses penentuan diri di wilayah-wilayah jajahan Perancis.<sup>2</sup> Oleh sebab itu Australia juga mendesak Perancis untuk menarik diri dari Kaledonia Baru, karena kuatir bahwa pertentangan di sana akan menjadi lebih tajam, sehingga membuka pintu bagi pengaruh Uni Soviet.<sup>3</sup> Sejak semula, Australia bersikap memusuhi Uni Soviet dan tidak ingin melihat ekspansi negara itu di kawasan-kawasan dunia terutama tetangganya. Namun untuk masa-masa mendatang Australia perlu juga menampung rasa tidak puas negara-negara tetangganya itu, betapa kecilnya pun pengaruh mereka terhadapnya.

<sup>1</sup>Ibid.

<sup>2</sup>Lihat Joint Committee on Foreign Affairs and Defence, *loc. cit.*, hal. 12.

<sup>3</sup>Lihat Richard Breeze, "The Thorn in France's Rose," *Far Eastern Economic Review*, 11 Sep-